

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Daerah dituntut agar lebih mampu mengelola segala sumber ekonomi secara mandiri dan bertanggungjawab serta berusaha meningkatkan kemandiriannya di bidang keuangan agar pelaksanaan otonomi daerah bisa berjalan lancar. Karena itu diperlukan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih adil.

Anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada indikator *input, output, outcome, benefit* dan *impact* dengan cara mengalokasikan sumber daya atau belanja program dan kegiatan.

Dalam penganggaran belanja Pemerintah Daerah yang berbasis kinerja, indikator kinerja tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), adapun fungsi dari indikator kinerja tersebut dapat dipergunakan sebagai pengukur tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas dari anggaran program kegiatan yang disusun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pengganti Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah harus bisa memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, serta berorientasi pada penggunaan sumber daya ekonomi secara ekonomis dan efisien.

Selama ini, pendekatan *incremental* dan *line item* digunakan dalam penentuan besarnya alokasi dana untuk suatu kegiatan oleh suatu unit kerja. Dalam penyusunan sistem *incremental* ini, besarnya dana yang dianggarkan untuk tahun yang akan datang adalah berdasarkan besarnya dana yang dianggarkan pada tahun berjalan ditambah dengan sejumlah persentase tertentu. Dengan demikian, maka penentuan besarnya pengeluaran untuk anggaran tahun berikutnya dilihat dari nilai tahun berjalan yang dijadikan sebagai dasar.

Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong buah pikiran yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen, selain itu partisipasi juga dapat meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kerja sama yang baik antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Apabila pegawai dilibatkan secara signifikan dalam proses penyusunan anggaran dengan pengendalian yang dilakukan oleh atasan, maka akan cenderung mendorong timbulnya ide-ide dari pegawai dan akan terjadi diskusi yang intensif antara pegawai dengan atasan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan akan meningkatkan kinerja.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah sulitnya menilai kewajaran beban kinerja dan biaya dari suatu kegiatan. Analisis Standar Belanja dapat digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagai instrumen untuk menilai kewajaran atas anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Penilaian kewajaran dilakukan dengan melihat apakah anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah masih berada dalam batasan nilai maksimum dan minimum yang tertera pada Analisis Standar Belanja (ASB).

Dari pengamatan awal diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tidak lepas dari permasalahan yang telah diuraikan di atas. Masalah lainnya adalah pada saat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan usulan program/kegiatan, anggaran yang diterima akan kurang atau lebih rendah dari anggaran yang diajukan, yang pada akhirnya ketika dana tersebut tidak cukup maka akan diajukan kembali anggaran perubahan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai BKPSDM Kabupaten Poso”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan ialah **“Adakah Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai BKPSDM Kabupaten Poso?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai BKPSDM Kabupaten Poso.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Bagi pembaca yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman serta dapat menjadi pembanding dalam melaksanakan penelitian.
2. Sebagai masukan untuk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Poso.

3. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

